



## TINJAUAN YURIDIS STANDAR PELAKSANAAN PENGAMANAN TERHADAP OBJEK VITAL (PAMOBVIT) DALAM MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN (Suatu Studi di Polda Sultra)

Umiyatin, Amir Faisal, La Ode Muhram

Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

Legal review,  
Maintaining security and order, Polda sultra, Standards of security implementation, Vital objects (pamobvit).

#### e-mail:

umiyatin78@gmail.com

#### Corresponding Author:

Umiyatin

Received:02/07/2024

Accepted:21/12/2024

Published:30/04/2025



### ABSTRACT

This study aims to 1) To find out and understand the standards for implementing security for vital objects (pamobvit) in maintaining security and order, 2) To find out and understand the efforts made to meet the standards for implementing security for vital objects (pamobvit) in maintaining security and order. This study is an empirical normative study, by studying books and laws and regulations related to the material for writing the thesis. Data collection techniques in the study were carried out by interviews and literature studies to obtain data related to the title of the thesis being raised. Furthermore, the data was processed and analyzed using qualitative descriptive methods by searching for and finding patterns and describing the reality that occurred. The results of this study conclude that the Standards for Implementing Security for Vital Objects (Pamobvit) in Maintaining Security and Order include Standards for implementing security for vital objects (Pamobvit) aim to maintain security and order in national vital objects (obvitnas) and certain vital objects (obvitter) including important facilities that support national interests, economy, politics, social, culture, defense, and security. This standard is regulated in various regulations, including the Regulation of the Chief of the Republic of Indonesia National Police (Perkap) and related government regulations to further strengthen all matters relating to the proper implementation standards in securing objects, the need for stricter regulation strengthening for its implementation and overcoming existing obstacles, the need for optimal supervision, especially in large areas such as oil refineries or mines, provision of security technology infrastructure such as CCTV and detection sensors, and personnel training to be more responsive to threats that occur.

### I. PENDAHULUAN

Dimensi ancaman dan gangguan keamanan dari waktu ke waktu semakin berkembang dengan beragam risiko dan dampaknya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatnya kompleksitas permasalahan masyarakat telah melahirkan beragam bentuk

ancaman dan gangguan keamanan terhadap berbagai obyek vital nasional (obvitnas), seperti bandara, pelabuhan, tempat pengolahan, penyimpanan dan distribusi BBM, sistem suplai udara, dan lain-lain.

Sistem pemantauan terus-menerus diperlukan untuk mendeteksi ancaman yang muncul dan meresponsnya dengan cepat. Hal ini melibatkan kerja sama antara pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat sipil. Perencanaan untuk menjaga kontinuitas operasi obyek vital dalam situasi darurat atau pasca-kejadian penting. Ini mencakup pengembangan rencana darurat, cadangan sistem, dan latihan simulasi. Dalam beberapa kasus, kerjasama internasional juga diperlukan untuk melindungi obyek vital yang mungkin menjadi target ancaman lintas batas.

Tinjauan obyek vital merupakan bagian penting dari upaya negara untuk menjaga keamanan nasional dan keberlangsungan hidup masyarakat. Itu juga penting bagi sektor swasta dan masyarakat sipil untuk memainkan peran dalam upaya perlindungan obyek vital ini. Dinamika gangguan keamanan di Indonesia sangat beragam dan berkaitan erat dengan faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Beberapa dinamika gangguan keamanan yang telah terjadi atau masih relevan di Indonesia. Meskipun Indonesia telah berhasil mengatasi banyak ancaman terorisme, keberadaan jaringan teroris seperti Jemaah Islamiyah dan kelompok terkait ISIS masih menjadi perhatian. Serangan teroris, baik yang besar maupun kecil, tetap menjadi ancaman.

Ketegangan etnis dan agama secara umum memiliki tradisi toleransi agama dan keragaman budaya yang juga penuh dinamika, terkadang terjadi konflik antar-etnis dan antar-agama yang memicu ketegangan dan kekerasan. Beberapa wilayah di Indonesia, seperti Papua dan Aceh, telah mengalami gerakan separatisme yang mencoba untuk memisahkan diri dari Indonesia. Meskipun situasinya menjadi lebih stabil dalam beberapa tahun terakhir, isu-isu tersebut masih mempengaruhi dinamika politik dan keamanan di wilayah tersebut.

Kriminalitas, termasuk kejahatan jalanan, pencurian, perampokan, dan perdagangan narkoba, tetap menjadi masalah serius di beberapa daerah di Indonesia. Peredaran senjata juga menjadi keprihatinan, terutama di wilayah yang terpencil. Kemudian Konflik pertanahan dan sosial, baik antara masyarakat lokal, perusahaan, maupun pemerintah, sering kali memunculkan ketegangan dan kekerasan. Isu ini sering terkait dengan eksploitasi sumber daya alam, hak-hak tanah, dan distribusi kekayaan. Standar Pelaksanaan Pengamanan menjadi pedoman atau prosedur yang ditetapkan untuk memastikan pelaksanaan pengamanan yang efektif dan konsisten. SPP biasanya dimiliki oleh badan atau lembaga yang bertanggung jawab atas keamanan dalam suatu konteks tertentu, seperti pemerintah, lembaga penegak hukum, atau organisasi swasta.

Beberapa hal yang mungkin dicakup dalam Standar Pelaksanaan Pengamanan sangat penting dalam memastikan bahwa pengamanan dilaksanakan dengan konsistensi, profesionalisme, dan efektivitas. Hal tersebut juga membantu dalam meningkatkan respons terhadap situasi darurat atau ancaman keamanan yang mungkin terjadi juga memastikan bahwa semua tindakan yang diambil sesuai dengan hukum dan prinsip etika, serta mematuhi regulasi terkait.

Penanganan gangguan keamanan berdasarkan peraturan biasanya melibatkan serangkaian langkah yang diatur dalam berbagai peraturan dan hukum yang berlaku di suatu negara. Di Indonesia, penanganan gangguan keamanan mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, terutama oleh Kepolisian Republik Indonesia dan lembaga terkait lainnya. Penanganan gangguan keamanan berdasarkan peraturan bertujuan untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil sesuai dengan hukum, efektif, dan proporsional terhadap situasi yang dihadapi. Hal ini juga mencakup perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan sipil dalam penanganan setiap situasi keamanan.

Polri berperan dalam mengidentifikasi obyek vital yang memerlukan perlindungan khusus untuk mencegah ancaman terhadap keamanan nasional. Ini termasuk infrastruktur kritis seperti pembangkit listrik, instalasi air bersih, jaringan transportasi, serta institusi penting seperti pusat pemerintahan, lembaga keuangan, dan sumber daya alam yang strategis.

Pengamanan obyek vital merupakan tanggung jawab bersama antara Polri, pemerintah, dan berbagai pihak terkait lainnya. Kerja sama yang baik dan koordinasi yang efektif antara semua pihak diperlukan untuk memastikan keamanan dan keberlangsungan obyek vital yang krusial bagi negara dan masyarakat. Dengan melakukan penilaian risiko terhadap obyek-obyek vital tersebut untuk mengidentifikasi ancaman potensial dan menetapkan tingkat keamanan yang diperlukan. kemudian mengatur strategi keamanan yang sesuai, termasuk penggunaan personel, peralatan teknologi keamanan, dan prosedur operasional standar.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Obyek Vital

Obyek vital adalah istilah yang digunakan untuk mengacu pada berbagai jenis objek atau fasilitas yang dianggap penting untuk keberlangsungan suatu negara, masyarakat, atau organisasi. Obyek vital ini dapat bervariasi tergantung pada konteksnya, tetapi sering kali mencakup infrastruktur kunci, sumber daya strategis, atau tempat-tempat yang memiliki nilai strategis dalam situasi tertentu.

Berikut beberapa contoh umum dari obyek vital:

- a. Infrastruktur kritis: Ini mencakup fasilitas-fasilitas seperti jaringan listrik, air bersih, sistem transportasi (jalan raya, rel kereta api, pelabuhan, bandara), serta komunikasi (jaringan telekomunikasi dan internet). Gangguan atau kerusakan pada infrastruktur kritis ini dapat memiliki dampak serius pada kehidupan sehari-hari masyarakat dan keberlangsungan bisnis.
- b. Sumber daya alam: Beberapa negara memiliki sumber daya alam yang sangat penting bagi ekonomi dan keamanan nasional, seperti minyak, gas alam, logam, atau air. Perlindungan terhadap akses dan kontrol terhadap sumber daya ini sering kali menjadi prioritas tinggi bagi pemerintah.
- c. Fasilitas militer: Pangkalan militer, pusat komando, atau fasilitas penelitian dan pengembangan teknologi militer merupakan obyek vital dalam konteks pertahanan nasional. Keamanan dan ketahanan fasilitas-fasilitas ini merupakan bagian integral dari strategi pertahanan suatu negara.
- d. Lembaga pemerintah: Gedung-gedung pemerintah, pusat administrasi, dan tempat-tempat di mana pengambilan keputusan kunci dilakukan merupakan obyek vital. Keamanan dari ancaman teroris atau kekerasan politik terhadap lembaga-lembaga ini sangat penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan.
- e. Fasilitas kesehatan dan keamanan: Rumah sakit, pusat kesehatan, serta stasiun polisi dan pemadam kebakaran juga termasuk dalam kategori obyek vital. Mereka adalah bagian integral dari infrastruktur masyarakat dan penting untuk memberikan layanan esensial kepada masyarakat.

### B. Standar

Standar adalah seperangkat aturan atau pedoman yang ditetapkan untuk menentukan kualitas, kesesuaian, atau konsistensi dalam suatu produk, layanan, atau proses. Standar dapat berlaku dalam berbagai bidang, termasuk teknologi, industri, lingkungan, kesehatan, dan keamanan. Tujuan utama dari standar adalah untuk memastikan bahwa produk atau layanan memenuhi tingkat kualitas, keamanan, dan kinerja yang diharapkan, serta untuk memfasilitasi interoperabilitas dan pertukaran yang efisien antara berbagai sistem atau produk. Ada beberapa jenis standar yang umum:

- a. Standar Industri: Ini adalah standar yang diterapkan dalam industri tertentu untuk memastikan kualitas produk, keselamatan kerja, dan efisiensi proses. Contohnya adalah ISO 9001 untuk manajemen mutu, ISO 14001 untuk manajemen lingkungan, atau standar keselamatan industri seperti OSHA di Amerika Serikat.
- b. Standar Teknologi: Ini adalah standar yang menetapkan spesifikasi teknis untuk perangkat keras atau perangkat lunak dalam suatu industri atau teknologi tertentu. Contoh standar teknologi termasuk standar WiFi untuk jaringan nirkabel atau standar HTML untuk pengembangan web.
- c. Standar Kesehatan dan Keselamatan: Ini adalah standar yang ditetapkan untuk memastikan lingkungan kerja yang aman dan sehat, serta untuk memastikan produk-produk kesehatan memenuhi persyaratan keselamatan dan efektivitas. Contoh standar kesehatan dan keselamatan termasuk standar OSHA untuk keselamatan kerja atau standar FDA untuk obat-obatan dan peralatan medis.
- d. Standar Lingkungan: Ini adalah standar yang ditetapkan untuk mengatur dampak lingkungan dari kegiatan industri, transportasi, atau konstruksi. Contoh standar lingkungan termasuk ISO 14001 untuk manajemen lingkungan atau standar emisi untuk industri tertentu.
- e. Standar Etika dan Kode Perilaku: Ini adalah standar yang menetapkan prinsip-prinsip etika atau kode perilaku yang harus diikuti oleh individu atau organisasi dalam suatu profesi atau industri tertentu. Contohnya adalah Kode Etik Profesi Medis atau Kode Etik Jurnalistik.

Penerapan standar dapat membantu meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kualitas dalam berbagai bidang, serta memfasilitasi perdagangan internasional dan kerja sama lintas batas. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap standar sering kali merupakan bagian penting dari strategi bisnis dan pengembangan produk.

Penetapan standar memiliki beberapa tujuan utama yang sangat penting dalam berbagai konteks, termasuk dalam industri, teknologi, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan. Berikut adalah beberapa tujuan utama penetapan standar:

- a. Memastikan Kualitas: Standar ditetapkan untuk memastikan bahwa produk atau layanan memenuhi tingkat kualitas yang diharapkan atau yang telah ditetapkan oleh industri atau masyarakat. Dengan adanya standar, konsumen dapat memiliki keyakinan bahwa produk atau layanan yang mereka beli memenuhi standar tertentu.
- b. Meningkatkan Keselamatan: Standar keselamatan ditetapkan untuk melindungi pekerja, konsumen, atau masyarakat umum dari risiko dan bahaya yang terkait dengan produk atau proses tertentu. Hal ini termasuk standar keselamatan kerja, standar keselamatan produk, atau standar keselamatan transportasi.
- c. Meningkatkan Efisiensi: Standar dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam proses produksi, distribusi, atau penggunaan suatu produk atau layanan dengan menetapkan metode atau prosedur yang efisien.
- d. Mendorong Inovasi: Standar teknologi sering kali mendorong inovasi dengan menetapkan spesifikasi atau persyaratan teknis yang baru untuk produk atau sistem tertentu. Hal ini dapat merangsang penelitian dan pengembangan teknologi baru.
- e. Interoperabilitas: Standar teknologi sering kali memfasilitasi interoperabilitas antara produk-produk atau sistem-sistem yang berbeda, memungkinkan mereka untuk berinteraksi atau berkomunikasi satu sama lain dengan lancar.

### **C. Pelaksanaan**

Pelaksanaan adalah proses atau langkah-langkah konkret yang diambil untuk menerapkan atau menjalankan suatu kebijakan, rencana, atau program dalam praktik. Ini melibatkan transformasi ide atau konsep menjadi tindakan nyata atau implementasi dalam konteks yang relevan.

Dalam berbagai konteks, pelaksanaan dapat merujuk pada berbagai hal, seperti:

- a. Implementasi Kebijakan: Pelaksanaan kebijakan melibatkan langkah-langkah untuk menerapkan kebijakan tertentu dalam praktek. Ini termasuk mengembangkan pedoman operasional,

- menyusun prosedur, memberikan pelatihan kepada personel, dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan
- b. Realisasi Proyek: Pelaksanaan proyek melibatkan langkah-langkah untuk menerjemahkan rencana proyek menjadi tindakan konkrit yang menghasilkan hasil yang diinginkan. Ini termasuk alokasi sumber daya, pengaturan jadwal, koordinasi tim, dan pengawasan progress
  - c. Penerapan Standar: Pelaksanaan standar melibatkan langkah-langkah untuk menerapkan standar tertentu dalam praktik. Ini bisa berupa mengubah proses produksi agar sesuai dengan standar kualitas, menyusun protokol keselamatan sesuai dengan standar yang ditetapkan, atau mengadaptasi sistem teknologi agar sesuai dengan standar interoperabilitas.
  - d. Pelaksanaan Strategi: Pelaksanaan strategi melibatkan langkah-langkah untuk menjalankan rencana strategis atau taktis dalam organisasi atau unit bisnis. Ini termasuk alokasi sumber daya, implementasi program-program spesifik, dan memonitor kemajuan menuju tujuan strategis.
  - e. Penyelenggaraan Program: Pelaksanaan program melibatkan langkah-langkah untuk melaksanakan program-program yang telah dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Ini bisa berupa penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat, program kesehatan masyarakat, atau program pendidikan.

#### **D. Pengamanan**

Pengamanan merujuk pada upaya untuk melindungi, mengamankan, atau menjaga sesuatu dari ancaman atau risiko yang mungkin mengancam keselamatan, keamanan, atau integritasnya. Ini dapat berlaku dalam berbagai konteks, mulai dari keamanan fisik suatu lokasi hingga pengamanan data digital.

#### **Menurut UU NO. 22 TAHUN 2022**

Pengamanan adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penindakan, dan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban yang diselenggarakan untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib di rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan.

Berikut adalah beberapa aspek penting dari pengamanan:

- a. Keamanan Fisik: Ini mencakup langkah-langkah untuk melindungi properti, fasilitas, atau individu dari ancaman fisik seperti pencurian, kebakaran, atau serangan fisik. Contohnya adalah penggunaan kunci, alarm kebakaran, CCTV, atau pengawasan keamanan.
- b. Keamanan Informasi: Ini melibatkan perlindungan terhadap informasi rahasia, sensitif, atau kritis dari akses yang tidak sah, manipulasi, atau pencurian. Ini mencakup enkripsi data, penggunaan sandi yang kuat, firewall, serta kebijakan dan prosedur yang mengatur akses dan penggunaan informasi.
- c. Keamanan Jaringan: Ini berkaitan dengan melindungi jaringan komputer dan sistem informasi dari ancaman seperti peretasan, virus komputer, atau serangan siber. Ini melibatkan penggunaan perangkat lunak keamanan, pemantauan jaringan, pembaruan perangkat lunak yang teratur, serta kesadaran akan keamanan digital.
- d. Keamanan Fisik Personal: Ini mencakup langkah-langkah untuk melindungi individu dari ancaman fisik atau kekerasan, baik di tempat kerja, di rumah, atau di tempat umum. Ini bisa berupa pelatihan keselamatan, penggunaan sistem alarm pribadi, atau peningkatan keamanan di area publik.
- e. Keamanan Transportasi: Ini melibatkan langkah-langkah untuk melindungi orang dan barang dari ancaman di lingkungan transportasi seperti kecelakaan kendaraan, tindak kejahatan di transportasi umum, atau ancaman teroris. Ini bisa berupa pemeriksaan keamanan di bandara, penggunaan perangkat pelacak di kendaraan, atau pengawasan keamanan di stasiun kereta api.
- f. Keamanan Finansial: Ini mencakup langkah-langkah untuk melindungi aset keuangan, transaksi, atau identitas dari kegiatan penipuan, pencurian, atau penipuan. Ini termasuk penggunaan

kartu kredit yang aman, pemantauan rekening keuangan secara rutin, serta pelatihan untuk mengenali penipuan keuangan.

#### **E. Obyek Vital**

Obyek vital merujuk kepada fasilitas, sumber daya, atau lokasi yang dianggap penting bagi kelangsungan hidup, keberlangsungan, atau keamanan suatu negara, masyarakat, atau organisasi. Obyek vital ini memiliki nilai strategis yang tinggi dan kemungkinan menjadi target dari ancaman atau serangan yang dapat mengganggu stabilitas atau keamanan. Sesuai dengan perintah perundangan, Polri berkewajiban untuk melaksanakan pengamanan obyek-obyek khusus. Dasar hukumnya adalah:

- a. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b. Perpres nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia
- c. Keputusan Presiden RI No 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional
- d. Perkap No 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah
- e. Perkap No 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Sektor
- f. Surat Keputusan Kapolri No.Pol : Skep/551/VIII/2003, Tanggal 12 Agustus 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Pengamanan Obyek Khusus
- g. Surat Keputusan kapolri No.Pol : Skep/738/X/2005, Tanggal 13 Oktober 2005 tentang Sistem Pengamanan Obyek Vital Nasional
- h. Direktif Kapolri No.Pol R/Dir/680/IX/2004 tentang Pengamanan Obyek Vital.

Beberapa contoh obyek vital termasuk:

- a. Infrastruktur Kritis: Ini mencakup fasilitas-fasilitas seperti jaringan listrik, air bersih, sistem transportasi (jalan raya, rel kereta api, pelabuhan, bandara), serta komunikasi (jaringan telekomunikasi dan internet). Gangguan atau kerusakan pada infrastruktur kritis ini dapat memiliki dampak serius pada kehidupan sehari-hari masyarakat dan keberlangsungan bisnis.
- b. Memiliki sumber daya alam yang sangat penting bagi ekonomi dan keamanan nasional, seperti minyak, gas alam, logam, atau air. Perlindungan terhadap akses dan kontrol terhadap sumber daya ini sering kali menjadi prioritas tinggi bagi pemerintah
- c. Fasilitas Militer: Pangkalan militer, pusat komando, atau fasilitas penelitian dan pengembangan teknologi militer merupakan obyek vital dalam konteks pertahanan nasional. Keamanan dan ketahanan fasilitas-fasilitas ini merupakan bagian integral dari strategi pertahanan suatu negara.
- d. Lembaga Pemerintah: Gedung-gedung pemerintah, pusat administrasi, dan tempat-tempat di mana pengambilan keputusan kunci dilakukan merupakan obyek vital. Keamanan dari ancaman teroris atau kekerasan politik terhadap lembaga-lembaga ini sangat penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan.
- e. Fasilitas Kesehatan dan Keamanan: Rumah sakit, pusat kesehatan, serta stasiun polisi dan pemadam kebakaran juga termasuk dalam kategori obyek vital. Mereka adalah bagian integral dari infrastruktur masyarakat dan penting untuk memberikan layanan esensial kepada masyarakat.

#### **F. Ketertiban**

Ketertiban merujuk pada keadaan di mana aturan, norma, atau tata tertib dihormati dan diterapkan dengan baik oleh individu atau kelompok dalam suatu masyarakat atau lingkungan tertentu. Ini melibatkan keteraturan, disiplin, dan kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan untuk menjaga harmoni, keamanan, dan kesejahteraan bersama.

Ketertiban adalah prasyarat bagi pembangunan yang berkelanjutan, perdamaian, dan kemajuan sosial. Tanpanya, masyarakat dapat mengalami ketegangan, konflik, dan ketidakstabilan yang mengganggu kehidupan sehari-hari serta pertumbuhan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, penting untuk mempromosikan dan memelihara ketertiban dalam semua aspek kehidupan masyarakat. (Andi Hamzah, 2001:56). Beberapa aspek penting dari ketertiban adalah:

- a. Keteraturan: Ketertiban menciptakan keteraturan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam perilaku individu, interaksi sosial, dan pelaksanaan kegiatan atau proses tertentu. Ini menciptakan kerangka kerja yang stabil dan dapat diprediksi untuk kehidupan Bersama
- b. Kedisiplinan: Ketertiban melibatkan kedisiplinan dalam mematuhi aturan dan norma yang telah ditetapkan. Ini mencakup kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri, mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, dan menghormati hak dan kebutuhan orang lain
- c. Kepatuhan Hukum: Ketertiban melibatkan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku dalam suatu masyarakat. Ini mencakup pematuhan terhadap hukum pidana, sipil, dan administratif yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang
- d. Keamanan: Ketertiban menciptakan lingkungan yang aman dan terlindungi bagi individu dan kelompok. Ini mencakup pengendalian kejahatan, penegakan hukum yang efektif, dan kerjasama antara masyarakat dan lembaga penegak hukum.
- e. Kesejahteraan Bersama: Ketertiban bertujuan untuk menciptakan kondisi yang mendukung kesejahteraan bersama bagi semua anggota masyarakat. Ini mencakup distribusi yang adil dari sumber daya, akses yang sama terhadap layanan publik, dan penghargaan terhadap keragaman dan kesetaraan
- f. Kehormatan dan Tanggung Jawab: Ketertiban mencakup penghargaan terhadap hak dan kebutuhan orang lain serta pengakuan terhadap tanggung jawab individu terhadap masyarakat. Ini melibatkan sikap hormat, toleransi, dan kerjasama dalam hubungan antarmanusia.

Pengamanan adalah serangkaian langkah atau tindakan yang dilakukan untuk melindungi, mengamankan, atau menjaga suatu objek, lokasi, atau informasi dari ancaman, risiko, atau kerentanan yang mungkin mengganggu keselamatan atau keamanannya. Tujuan utama dari pengamanan adalah untuk mencegah kerugian, melindungi kepentingan, dan memastikan kelangsungan atau keberlanjutan dari sesuatu yang diproteksi. Berikut adalah beberapa aspek penting dari pengamanan:

- a. Identifikasi Ancaman: Langkah awal dalam pengamanan adalah mengidentifikasi potensi ancaman atau risiko yang mungkin timbul terhadap objek atau lokasi yang akan diamankan. Ancaman ini bisa berasal dari berbagai sumber, termasuk kejahatan, bencana alam, atau ancaman dari pihak-pihak tertentu.
- b. Evaluasi Risiko: Setelah identifikasi ancaman dilakukan, langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi risiko untuk menilai seberapa besar potensi dampak dari ancaman tersebut terhadap objek atau lokasi yang diamankan. Ini membantu dalam menentukan tingkat keamanan yang diperlukan dan langkah-langkah yang harus diambil untuk mengatasi risiko tersebut.
- c. Perencanaan dan Implementasi Tindakan Pengamanan: Berdasarkan evaluasi risiko, perlu dilakukan perencanaan dan implementasi tindakan pengamanan yang sesuai. Ini bisa mencakup penggunaan teknologi keamanan seperti kamera pengawas, alarm, atau sistem keamanan elektronik lainnya, serta penggunaan personel keamanan, pengaturan perimeter, atau peningkatan keamanan fisik.
- d. Pelatihan dan Kesadaran: Penting untuk melatih dan meningkatkan kesadaran dari individu atau personel yang terlibat dalam pengamanan. Ini mencakup pelatihan dalam penggunaan teknologi keamanan, prosedur keamanan, serta pengenalan terhadap ancaman atau tindakan yang mencurigakan.
- e. Pemantauan dan Respons: Pengamanan juga melibatkan pemantauan terhadap situasi atau kondisi yang mungkin mengancam keamanan, serta respons cepat terhadap ancaman yang terdeteksi. Ini bisa mencakup pengawasan secara real-time, peninjauan rutin, atau respons darurat dalam situasi tertentu.

- f. Evaluasi dan Perbaikan: Setelah tindakan pengamanan dilaksanakan, penting untuk terus melakukan evaluasi terhadap efektivitasnya dan melakukan perbaikan atau penyesuaian sesuai kebutuhan. Hal ini membantu dalam memastikan bahwa pengamanan tetap relevan dan efektif terhadap ancaman yang berkembang.

## G. Dasar Pelaksanaan

Pelaksanaan keamanan obyek vital nasional melibatkan serangkaian langkah yang kompleks dan terkoordinasi dengan baik, yang ditujukan untuk melindungi fasilitas-fasilitas atau lokasi-lokasi yang dianggap penting bagi keberlangsungan negara dan masyarakat. Berikut adalah beberapa dasar pelaksanaan obyek vital nasional:

- a. Identifikasi Obyek Vital: Langkah pertama adalah mengidentifikasi obyek-obyek vital nasional. Ini melibatkan penilaian menyeluruh terhadap infrastruktur, sumber daya, atau fasilitas yang memiliki nilai strategis bagi keamanan, pertahanan, atau kelangsungan hidup negara. Obyek vital ini bisa meliputi instalasi militer, pusat pemerintahan, infrastruktur kritis seperti jaringan listrik atau air bersih, serta tempat-tempat yang berpotensi menjadi target teroris
- b. Penilaian Risiko: Setelah obyek vital diidentifikasi, langkah berikutnya adalah melakukan penilaian risiko terhadap setiap obyek tersebut. Ini melibatkan evaluasi terhadap potensi ancaman dan risiko yang mungkin mengganggu keamanan atau kelangsungan obyek vital tersebut. Penilaian risiko ini membantu dalam menentukan prioritas dan strategi pengamanan yang diperlukan.
- c. Pengembangan Kebijakan dan Prosedur: Obyek vital nasional memerlukan kebijakan dan prosedur yang jelas untuk melindunginya dari ancaman potensial. Ini mencakup pengembangan standar operasional, pedoman keamanan, serta kerangka kerja untuk penegakan hukum dan respons darurat dalam situasi yang kritis.
- d. Implementasi Teknologi dan Sistem Keamanan: Obyek vital nasional sering dilengkapi dengan teknologi dan sistem keamanan yang canggih. Ini bisa mencakup penggunaan kamera pengawas, sistem alarm, sensor deteksi, kontrol akses, dan pengamanan perimeter. Sistem-sistem ini membantu dalam mendeteksi, mencegah, atau merespons ancaman dengan cepat dan efektif
- e. Pelatihan Personel: Personel yang bertanggung jawab atas pengamanan obyek vital harus dilatih dengan baik dalam prosedur keamanan, teknologi yang digunakan, serta respons darurat. Pelatihan ini mencakup pengenalan terhadap ancaman yang mungkin terjadi, taktik keamanan, dan tindakan yang harus diambil dalam situasi yang kritis.
- f. Kerjasama antar instansi: Pelaksanaan keamanan obyek vital nasional memerlukan kerjasama yang erat antara berbagai lembaga dan instansi yang terlibat, termasuk kepolisian, militer, badan intelijen, serta sektor swasta. Kolaborasi ini penting untuk pertukaran informasi yang efektif, koordinasi operasional, dan respons terhadap ancaman yang kompleks dan terkoordinasi.
- g. Pemantauan dan Evaluasi: Pengamanan obyek vital nasional memerlukan pemantauan terus-menerus terhadap situasi keamanan, serta evaluasi terhadap efektivitas langkah-langkah pengamanan yang telah diimplementasikan. Pemantauan ini memungkinkan untuk mendeteksi perubahan risiko atau ancaman yang mungkin timbul, serta melakukan penyesuaian atau perbaikan yang diperlukan.

Beberapa instrumen hukum yang umum digunakan dalam pengamanan obyek vital nasional adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Keamanan Nasional: Undang-undang ini menetapkan kerangka kerja umum untuk keamanan nasional, termasuk pengamanan obyek vital. Ini mungkin mencakup definisi obyek vital, wewenang pemerintah atau lembaga yang bertanggung jawab atas pengamanan, serta sanksi hukum untuk pelanggaran terhadap keamanan nasional.
- b. Undang-Undang Keamanan Infrastruktur Kritis: Undang-undang ini ditujukan khusus untuk melindungi infrastruktur kritis yang merupakan bagian dari obyek vital nasional, seperti sistem

- energi, air, telekomunikasi, transportasi, dan keuangan. Undang-undang ini biasanya mengatur standar keamanan, pelaporan insiden, serta sanksi untuk pelanggaran.
- c. Peraturan Perlindungan Data dan Informasi: Perlindungan data dan informasi sensitif merupakan bagian penting dari pengamanan obyek vital nasional. Peraturan ini mungkin mencakup persyaratan untuk enkripsi data, pengaturan akses terhadap informasi, serta tindakan yang harus diambil dalam kasus pelanggaran keamanan data.
  - d. Kebijakan Keamanan Pemerintah: Pemerintah sering kali menetapkan kebijakan keamanan khusus yang mengatur aspek-aspek tertentu dari pengamanan obyek vital nasional. Ini bisa mencakup kebijakan terkait dengan penggunaan teknologi keamanan, pelatihan personel, kerjasama antarinstansi, serta respons terhadap ancaman teroris atau serangan siber
  - e. Peraturan dan Standar Keamanan: Terkadang, peraturan dan standar khusus ditetapkan untuk mengatur keamanan obyek vital nasional dalam sektor-sektor tertentu, seperti energi, transportasi, atau kesehatan. Peraturan ini mungkin menetapkan persyaratan teknis, prosedural, atau organisasi yang harus dipenuhi oleh pemilik atau operator obyek vital.
  - f. Perjanjian Internasional: Beberapa negara juga dapat memiliki kewajiban hukum untuk melindungi obyek vital nasional berdasarkan perjanjian internasional yang mereka ikuti. Ini termasuk perjanjian keamanan atau perlindungan data yang mengatur kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah tertentu dalam melindungi kepentingan nasional mereka.

Instrumen hukum ini memberikan kerangka kerja yang diperlukan untuk pengamanan obyek vital nasional, serta memberikan landasan hukum bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam menjaga keamanan dan integritas nasional.

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di provinsi Sulawesi Tenggara khususnya di Polda Sulawesi Tenggara. Adapun pertimbangan dan alasan penulis memilih lokasi penelitian tersebut adalah karena dapat memudahkan penulis untuk memperoleh data mengenai obyek penelitian. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Standar Pelaksanaan Pengamanan Terhadap Obyek Vital (Pamobvit) Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban

Standar pelaksanaan pengamanan terhadap objek vital (Pamobvit) bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di objek vital nasional (obvitnas) dan objek vital tertentu (obvitter) mencakup fasilitas penting yang mendukung kepentingan nasional, ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Standar ini diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) dan peraturan pemerintah terkait. Poin utama terkait standar pelaksanaan Pamobvit:

1. Identifikasi Objek Vital
  - a. Kriteria Obvitnas: Objek dengan kepentingan strategis nasional, seperti pembangkit listrik, kilang minyak, bandara, pelabuhan, dan fasilitas telekomunikasi.
  - b. Penetapan: Penetapan sebagai obvitnas dilakukan oleh pemerintah melalui kementerian terkait.
  - c. Evaluasi Berkala: Objek vital harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan relevansinya.
2. Standar Pengamanan
  - a. Sistem Keamanan: Menerapkan teknologi seperti CCTV, detektor logam, dan sistem alarm.
  - b. Sumber Daya Manusia: Melibatkan petugas keamanan yang terlatih, baik dari kepolisian maupun pihak ketiga (satpam atau tenaga keamanan khusus).

- c. Koordinasi: Melibatkan kerja sama antara pihak pengelola objek vital, Polri, dan instansi terkait.
3. Keterlibatan Polri
    - a. Dasar Hukum: Berdasarkan Perkap No. 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Objek Vital Nasional.
    - b. Pengawasan dan Patroli: Polisi bertugas melakukan pengawasan, patroli, serta penanganan insiden yang berpotensi mengganggu keamanan.
    - c. Personel Khusus: Diberikan personel kepolisian yang telah mendapatkan pelatihan khusus Pamobvit.
  4. Perencanaan Pengamanan
    - a. Analisis Risiko: Mengidentifikasi potensi ancaman terhadap objek vital.
    - b. Rencana Kontijensi: Menyusun langkah-langkah penanganan jika terjadi gangguan keamanan, seperti sabotase, kebakaran, atau ancaman terorisme.
    - c. SOP (Standard Operating Procedure): Semua kegiatan pengamanan dilakukan sesuai SOP yang ditetapkan.
  5. Peningkatan Kapasitas
    - a) Latihan dan Simulasi: Melakukan latihan rutin untuk menghadapi ancaman tertentu.
    - b) Sosialisasi: Meningkatkan kesadaran para pegawai dan pihak terkait terhadap pentingnya pengamanan.
  6. Evaluasi dan Pengawasan
    - a) Audit Keamanan: Melakukan evaluasi berkala terhadap sistem pengamanan.
    - b) Peningkatan Sistem: Menyesuaikan pengamanan dengan perkembangan teknologi dan ancaman terbaru.
  7. Kolaborasi Multistakeholder
    - a) Keterlibatan Instansi Lain: Kerja sama dengan TNI, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk pengamanan.
    - b) Partisipasi Masyarakat: Memberikan edukasi kepada masyarakat di sekitar objek vital untuk mendukung keamanan.

Urgensi standar pengamanan Objek Vital Nasional (Obvitnas) sangat penting karena Obvitnas memiliki peran strategis dalam mendukung kehidupan masyarakat, stabilitas negara, dan kelangsungan ekonomi nasional. Pengamanan yang tidak memadai dapat mengakibatkan gangguan yang berdampak luas, baik secara sosial, ekonomi, maupun politik. Pengamanan terhadap objek vital merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah, pengelola, maupun masyarakat. Tugas Polri berperan strategis dalam memastikan sistem pengamanan berjalan efektif untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban di obvitnas dan obvitter. Berikut adalah urgensi standar pengamanan Obyek vital nasional:

1. Menjamin Stabilitas Keamanan Nasional
  - a) Peran Strategis Obvitnas: Obvitnas seperti pembangkit listrik, kilang minyak, bandara, dan fasilitas telekomunikasi merupakan tulang punggung infrastruktur negara.
  - b) Ancaman Keamanan: Tanpa standar pengamanan, Obvitnas rentan terhadap sabotase, terorisme, pencurian, hingga serangan siber, yang dapat mengganggu stabilitas nasional.
  - c) Pencegahan Krisis: Sistem pengamanan yang baik memastikan respons cepat terhadap ancaman yang muncul.
2. Melindungi Kepentingan Ekonomi
  - a) Dampak Ekonomi: Gangguan terhadap Obvitnas dapat mengakibatkan kerugian ekonomi besar, seperti penghentian produksi, kerusakan infrastruktur, atau penurunan kepercayaan investor.
  - b) Keberlanjutan Operasional: Standar pengamanan memastikan kelangsungan operasional fasilitas yang berdampak pada roda perekonomian nasional.
3. Memitigasi Risiko Terorisme dan Sabotase
  - a) Target Strategis: Obvitnas sering menjadi target kelompok teroris atau pihak yang ingin mengganggu negara.

- b) Standar Keamanan: Sistem keamanan yang terstandar mempersulit akses bagi pelaku kejahatan, baik secara fisik maupun siber.
  - c) Kesiapan Menghadapi Ancaman: Melalui SOP dan simulasi, pengelola Obvitnas siap menangani insiden dengan lebih efektif.
4. Melindungi Masyarakat dan Lingkungan Sekitar
- a) Keselamatan Publik: Kerusakan atau gangguan pada Obvitnas, seperti ledakan kilang minyak atau gangguan jaringan listrik, dapat mengancam keselamatan masyarakat di sekitarnya.
  - b) Dampak Lingkungan: Insiden pada fasilitas seperti tambang atau kilang minyak dapat menyebabkan pencemaran lingkungan yang parah.
  - c) Tanggung Jawab Negara: Memberikan perlindungan terhadap masyarakat melalui pengamanan yang optimal.
5. Meningkatkan Kepercayaan Publik dan Internasional
- a) Kepercayaan Publik: Standar pengamanan memberikan rasa aman kepada masyarakat bahwa fasilitas penting negara terlindungi dengan baik.
  - b) Kepercayaan Investor: Sistem pengamanan yang kokoh meningkatkan kepercayaan investor dalam menanamkan modalnya di sektor infrastruktur dan energi.
6. Mendukung Stabilitas Pemerintahan
- a) Minimalkan Krisis Politik: Insiden pada Obvitnas dapat menjadi isu politik yang merugikan pemerintah.
  - b) Dukungan Kebijakan: Pengamanan yang efektif mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam menjaga ketahanan nasional.
7. Meningkatkan Efektivitas Koordinasi Multi-Instansi
- a) Keterlibatan Banyak Pihak: Standar pengamanan mencakup sinergi antara Polri, TNI, BIN, BNPT, dan instansi lainnya untuk memastikan sistem keamanan terpadu.
  - b) Efisiensi Penanganan Insiden: Dengan prosedur yang terstandar, semua pihak dapat bekerja sama secara efisien.
8. Mewujudkan Ketahanan Nasional
- a) Ketahanan Energi, Ekonomi, dan Infrastruktur: Obvitnas merupakan bagian integral dari ketahanan nasional yang harus dilindungi.
  - b) Keamanan Jangka Panjang: Standar pengamanan memberikan perlindungan terhadap ancaman jangka panjang yang dapat mengganggu kedaulatan negara.

## **B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengamanan Terhadap Objek Vital (Pamobvit) Dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban**

Pelaksanaan pengamanan terhadap Objek Vital Nasional (Obvitnas) dalam menjaga keamanan dan ketertiban tidak selalu berjalan mulus. Berbagai faktor dapat menghambat efektivitas upaya pengamanan ini, baik yang berasal dari internal sistem pengamanan itu sendiri maupun dari eksternal. Berikut adalah faktor-faktor penghambat dan dampaknya:

1. Keterbatasan Sumber Daya
2. Kurangnya Koordinasi Antar-Instansi
3. Ancaman Teknologi dan Serangan Siber
4. Rendahnya Kesadaran Keamanan
5. Kompleksitas Lingkungan Objek Vital
6. Tingginya Risiko Ancaman

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Bahwa berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan pengamanan terhadap objek vital (pamobvit) dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Identifikasi Objek Vital
  - a. Kriteria Obvitnas: Objek dengan kepentingan strategis nasional, seperti pembangkit listrik, kilang minyak, bandara, pelabuhan, dan fasilitas telekomunikasi.
  - b. Penetapan: Penetapan sebagai obvitnas dilakukan oleh pemerintah melalui kementerian terkait.
  - c. Evaluasi Berkala: Objek vital harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan relevansinya.
2. Standar Pengamanan
  - a. Sistem Keamanan: Menerapkan teknologi seperti CCTV, detektor logam, dan sistem alarm.
  - b. Sumber Daya Manusia: Melibatkan petugas keamanan yang terlatih, baik dari kepolisian maupun pihak ketiga (satpam atau tenaga keamanan khusus).
  - c. Koordinasi: Melibatkan kerja sama antara pihak pengelola objek vital, Polri, dan instansi terkait.

## B. Saran

1. Standar Pelaksanaan Pengamanan Terhadap Objek Vital (Pamobvit) Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban mencakup Standar pelaksanaan pengamanan terhadap objek vital (Pamobvit) bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di objek vital nasional (obvitnas) dan objek vital tertentu (obvitter) mencakup fasilitas penting yang mendukung kepentingan nasional, ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Standar ini diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) dan peraturan pemerintah terkait untuk lebih menguatkan segala hal yang berkaitan dengan standar pelaksanaan yang tepat dalam pengamanan obvit perlunya penguatan regulasi yang lebih ketat lagi untuk pelaksanaannya.
2. Untuk mengatasi hambatan yang ada perlunya Pengawasan optimal, terutama di area luas seperti kilang minyak atau tambang, penyediaan infrastruktur teknologi keamanan seperti CCTV dan sensor deteksi serta pelatihan personel agar lebih respons terhadap ancaman yang terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdilla Fauzi Achmad, 2012, Tata Kelola Bernegara Dalam Perspektif Politik, Cet. Kesatu, Golden Terayon Press, Jakarta.
- Abdul Latif dan Hasbi Ali, 2010. Politik Hukum, Sinar Grafika, Bandung.
- Anang Husni, 2009. Hukum, Birokrasi, dan Budaya, Cetakan Kesatu, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 2001. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Irianto, Sulistyowati dan Shidarta. 2011. Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor
- Mochtar Kusumaatmadja, 2006. Konsep-Konsep Dalam Pembangunan, Alumni, Bandung.
- Poerwadarminta, WJS 1994. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- <https://migas.esdm.go.id/post/read/sosialisasi-sistem-manajemen-pengamanan-obvitnas-migas>
- <https://polri.go.id/pengamanan-obvit>

## Perundang-Undangan

- Direktif Kapolri No.Pol R/Dir/680/IX/2004 tentang Pengamanan Obyek Vital.
- Keputusan Presiden RI No 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional.
- Perkap No 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.
- Perkap No 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Sektor.

Perpres nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia  
Surat Keputusan Kapolri No.Pol : Skep/551/VIII/2003, Tanggal 12 Agustus 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Pengamanan Obyek Khusus.  
Surat Keputusan kapolri No.Pol : Skep/738/X/2005, Tanggal 13 Oktober 2005 tentang Sistem Pengamanan Obyek Vital Nasional.  
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia